



BULETIN APBN

Vol. VII, Edisi 14, Agustus 2022

**Mencapai Target Inklusi
Keuangan Melalui
Optimalisasi Sektor
Fintech**
p.3

**Dilema di Balik Subsidi
Energi**
p.8

**Peluang dan
Tantangan Hilirisasi
Industri Kelapa
Sawit Indonesia**
p.12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor

Nadya Ahda

Mencapai Target Inklusi Keuangan Melalui Optimalisasi Sektor Fintech

p.3

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan keuangan digital (fintech) meningkat cukup signifikan. Terlebih pada saat pandemi Covid-19, transformasi digital dan teknologi menjadi sektor yang diunggulkan. Pesatnya perkembangan fintech di Indonesia perlu menjadi peluang bagi pemerintah dalam menangkap potensi yang ditimbulkan oleh sektor fintech, terutama terkait inklusi keuangan. Industri fintech merupakan salah satu pendorong utama bagi peningkatan inklusi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong optimalisasi sektor fintech. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan literasi keuangan masyarakat, membangun infrastruktur digital yang merata, serta mengembangkan identitas digital yang terintegrasi, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

p.8

Dilema di Balik Subsidi Energi

Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 sebesar Rp74,9 triliun. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber dalam jangka pendek. Namun, kebijakan subsidi energi ini dinilai tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena dinilai tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas, sehingga pemerintah perlu solusi selain subsidi energi.

Peluang dan Tantangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia

p.12

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan perekonomian nasional dan penghasil devisa negara terbesar Indonesia. Namun hingga saat ini, Indonesia masih hanya berfokus pada ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Padahal, ceruk pasar produk turunan CPO masih sangat besar, baik pasar domestik maupun pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi produk turunan CPO harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Dalam mendorong hilirisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta produktivitas perkebunan sawit merupakan tantangan yang harus mampu diselesaikan pemerintah.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Mencapai Target Inklusi Keuangan Melalui Optimalisasi Sektor Fintech

Satrio Arga Effendi*)

Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan keuangan digital (*fintech*) meningkat cukup signifikan. Terlebih pada saat pandemi Covid-19, transformasi digital dan teknologi menjadi sektor yang diunggulkan. Pesatnya perkembangan *fintech* di Indonesia perlu menjadi peluang bagi pemerintah dalam menangkap potensi yang ditimbulkan oleh sektor *fintech*, terutama terkait inklusi keuangan. Industri *fintech* merupakan salah satu pendorong utama bagi peningkatan inklusi keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong optimalisasi sektor *fintech*. Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, seperti meningkatkan literasi keuangan masyarakat, membangun infrastruktur digital yang merata, serta mengembangkan identitas digital yang terintegrasi, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan target tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 90 persen di tahun 2024. Hal tersebut ditetapkan dalam program kerja Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2021-2024. Namun, untuk mencapai target tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagaimana tidak, berdasarkan laporan *Financial Inclusion Insight*, terdapat 58,2 persen populasi Indonesia masih *unbankable* (tidak memiliki rekening bank) di tahun 2020. Persentase tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan Singapura dan Malaysia dengan persentase masing-masing sebesar 2 dan 15 persen. Berdasarkan hasil survei OJK, indeks inklusi keuangan Indonesia sebesar 76,19 persen di tahun 2019. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat berbagai peluang yang ada untuk dapat mencapai target inklusi keuangan di tahun 2024, salah satunya melalui peran sektor *financial technology* (*fintech*).

Sektor *fintech* diperkirakan mampu mendorong peningkatan inklusi keuangan. Penggunaan jaringan internet sebagai basis layanan memungkinkan pemberi jasa menjangkau berbagai wilayah secara instan dan memudahkan masyarakat mendapat akses ke berbagai macam produk dan layanan keuangan sesuai

kebutuhan. Tulisan ini akan membahas mengenai potensi dan tantangan dalam mencapai target inklusi keuangan melalui optimalisasi sektor *fintech*.

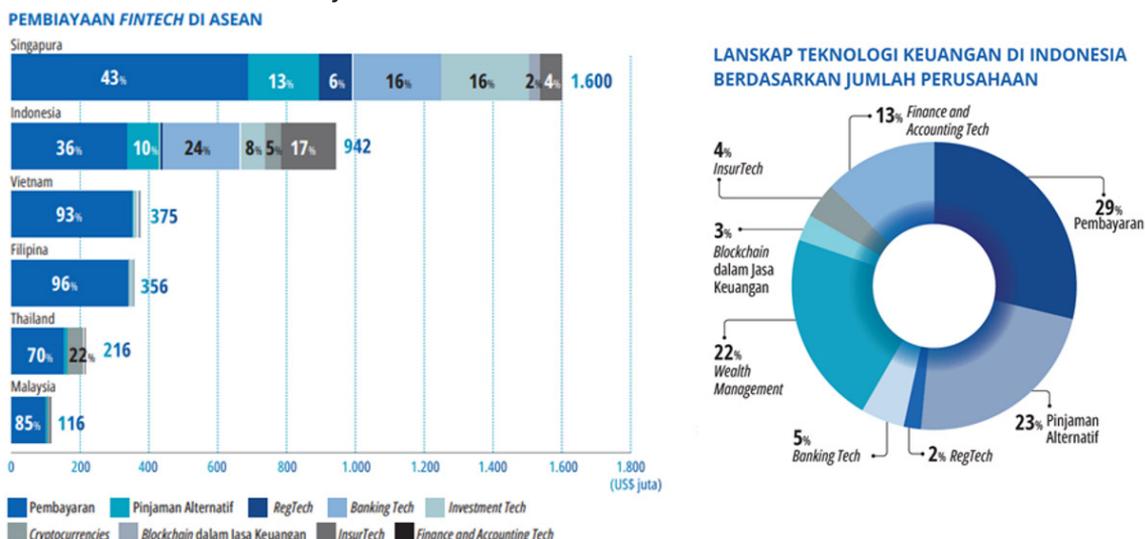
Industri *Fintech* Indonesia Didominasi oleh Jasa *Payment Gateway*, *Peer to Peer Lending*, dan *Wealth Management*

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan keuangan digital (*fintech*) meningkat cukup signifikan. Terlebih pada saat pandemi Covid-19, transformasi digital dan teknologi menjadi sektor yang diunggulkan. Penetrasi internet di Indonesia meningkat dari 56 persen menjadi 74 persen pada tahun 2019-2021. Berdasarkan laporan ASEAN 2021, total pendanaan *fintech* pada 6 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN meningkat hingga 3 kali lipat pada tahun 2020-2021. Indonesia menempati peringkat kedua dengan persentase investasi sebesar 26 persen, dan setiap kategori *fintech* di Indonesia menerima pendanaan. Hal tersebut mencerminkan bahwa *fintech* merupakan industri yang dinamis dan menjanjikan.

Bermula dari *e-money* dan *peer to peer* (*P2P*) *lending*, saat ini industri *fintech* telah memperluas segmen pasar dan produknya, mulai dari investasi, asuransi, dan lain-lain. Dari keseluruhan perusahaan

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: arga.effendi@gmail.com*

Gambar 1. Pembiayaan *Fintech* di ASEAN dan Jenis *Fintech* di Indonesia Tahun 2021



Sumber: EV-DCI 2022

fintech di Indonesia, ada 3 jenis layanan yang mendominasi, yaitu pembayaran/*payment gateway* (29 persen), pinjaman (25 persen), dan pengelolaan kekayaan/*wealth management* (22 persen) (Gambar 1).

Menurut survei dari PwC Indonesia tahun 2021, pandemi membuat rata-rata pengeluaran bulanan transaksi dompet digital/*e-wallet* meningkat sebesar 9,5 persen atau sekitar Rp810 ribu. Berdasarkan survey *Katadata Insight Centre* (KIC) tahun 2021, sebanyak 65 persen responden memilih *e-wallet* sebagai alat pembayaran berbelanja di *e-commerce*. Oleh karena itu, sektor pembayaran *fintech* mengalami pertumbuhan yang pesat dengan nilai transaksi yang cukup besar. Menurut

data Bank Indonesia dalam EV-DCI, hingga akhir tahun 2021, total transaksi uang digital mencapai Rp35,1 triliun, atau meningkat tajam sebesar 59 persen dari tahun 2020 yang sebesar Rp22 triliun (Gambar 2).

Pandemi Covid-19 juga turut mengakibatkan banyak masyarakat menghadapi krisis finansial, baik karena kehilangan pekerjaan atau pengurangan penghasilan. Berdasarkan data BPS, persentase tenaga formal menurun di era pandemi, dari 44,12 persen tahun 2019 menjadi 39,53 persen tahun 2020. Sehingga, pendapatan tahunan rata-rata masyarakat ikut turun dari Rp59,1 juta menjadi Rp56,9 juta di tahun 2020. BPS juga mencatat terdapat peningkatan 11,2 persen orang miskin di tahun yang sama. Bahkan Indonesia sempat dinyatakan mengalami resesi pada tahun 2021. Di tengah gejolak ekonomi nasional yang tidak stabil, banyak masyarakat yang menggunakan *platform P2P lending* guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Menurut survei PwC 2021, rerata frekuensi pinjaman mengalami peningkatan dari 3,3 menjadi 4 kali setiap tahunnya. OJK juga mencatat adanya peningkatan jumlah rekening peminjam *P2P lending* sebesar 287 persen (71,8 juta rekening) selama 2019-2021. Tren akumulasi penyaluran kredit juga tumbuh sebesar 248 persen.

Gambar 2. Transaksi Uang Digital di Indonesia Tahun 2021 (Triliun Rupiah)



Sumber: Bank Indonesia dalam EV-DCI 2022

Selanjutnya, proporsi kredit produktif terhadap total kredit naik dari 42,5 persen menjadi 63,2 persen selama tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan kebutuhan pembiayaan yang terus naik guna mengembangkan bisnis masyarakat di masa pandemi.

Masa dimulainya pandemi Covid-19 juga turut menjadi katalis pertumbuhan teknologi investasi. Pembatasan aktivitas fisik dan gejolak keuangan membuat masyarakat berusaha meningkatkan pendapatan sekaligus mematuhi pembatasan sosial. Menurut data KSEI, jumlah investor pasar modal dan reksadana di tahun 2021 meningkat tajam, yaitu sebesar 930 persen dan 115,4 persen.

Inklusivitas Keuangan Berpotensi Meningkatkan Efisiensi Ekonomi

Dari sisi masyarakat, inklusivitas keuangan mampu menumbuhkan budaya menabung, memupuk aset, hingga meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan efisiensi dalam melakukan transaksi pembayaran. Dari sisi stabilitas sistem keuangan, inklusivitas keuangan dapat mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), sehingga fungsi intermediasi dari lembaga keuangan dapat dioptimalkan. Inklusivitas keuangan juga memperkecil *shadow economy* atau transaksi ekonomi yang tidak tercatat sehingga rawan menimbulkan tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Inklusivitas keuangan juga dapat meningkatkan *buffer* bagi sistem keuangan apabila terjadi kondisi resesi. Pada akhirnya, bagi perekonomian nasional, inklusivitas keuangan dapat memperkecil kesenjangan sosial, mendukung penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan efisiensi secara nasional.

Industri *fintech* diharapkan dapat mewujudkan inklusivitas keuangan tersebut dengan mempercepat ketersediaan akses ke produk dan layanan keuangan, serta menjangkau masyarakat agar dapat terhubung dengan lebih banyak layanan keuangan, baik

masyarakat yang *unbanked* maupun *underbanked*. Industri *fintech* mampu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke layanan keuangan dan produk-produk seperti tabungan, kredit, pembayaran, dan investasi bagi individu yang selama ini belum tersentuh oleh bank konvensional.

Perkembangan Industri Fintech Indonesia Terhambat oleh Rendahnya Literasi Finansial, Maraknya Pinjol Ilegal, Pembangunan Infrastruktur Digital Belum Merata, dan Belum Adanya Identitas Digital

Literasi finansial terutama pemahaman mengenai layanan, produk, aktivitas, dan layanan keuangan merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan sektor *fintech*. Pernyataan tersebut didukung laporan *Asian Development Bank* tahun 2020, dimana literasi finansial yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan penggunaan layanan *fintech*. Sementara itu, hasil survei OJK tahun 2019 menyatakan bahwa literasi finansial Indonesia hanya 38,03 persen. Rendahnya literasi finansial tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat dan membawa konsekuensi lanjutan seperti kurangnya modal usaha, tingginya utang, hingga kebangkrutan. Rendahnya literasi finansial juga memengaruhi pertumbuhan dan kredibilitas sektor *fintech*, terutama terkait *P2P lending* akibat maraknya pinjaman *online* (pinjol) ilegal.

Menurut Satgas Waspada Investasi (SWI), setidaknya terdapat 3.631 perusahaan pinjol ilegal yang telah ditutup, dan terdapat lebih dari 8.000 pengaduan hingga November 2021. Menurut SWI, *platform* pinjol ilegal sulit diberantas meskipun pemerintah telah menutup dan memblokir aplikasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan mudahnya menyalin *software* dan data bagi para pinjol sehingga memudahkan untuk berganti nama dan aplikasi baru setelah aplikasi sebelumnya diblokir. Selain itu, banyak pinjol ilegal yang menggunakan *server* atau dikendalikan dari luar negeri

menambah kesulitan bagi pemerintah dalam melakukan pemberantasan.

Persoalan literasi finansial dan maraknya pinjol ilegal merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, pemerintah melalui OJK dan DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) perlu terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya tingkat literasi keuangan, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik dan optimal. Selain itu, literasi keuangan juga menjadi kunci utama bagi pemberantasan pinjol ilegal selain penindakan hukum.

Infrastruktur digital di Indonesia saat ini juga belum merata. Hingga kini, Indonesia masih mengalami kesenjangan digital yang cukup signifikan. Masih ada 12.548 desa yang belum mendapatkan layanan internet. Jika dilihat dari laporan kinerja Kemenkominfo 2021, capaian kinerja Kemenkominfo dalam pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) 4G di wilayah 3T dan non-3T hanya sebesar 25,22 persen. Dari target 5.623 desa/kelurahan hanya tercapai 1.418 desa/kelurahan yang telah mendapatkan akses internet 4G. Kesenjangan internet ini pula yang menjadikan penetrasi layanan *fintech* juga terhambat dan tersentralisasi di pulau Jawa. Menurut Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), penyaluran pembiayaan ke luar Jawa hanya 18 persen, sementara 82 persen pembiayaan lainnya disalurkan di Pulau Jawa. Kesenjangan infrastruktur digital juga menjadi salah satu alasan yang membuat perusahaan *fintech* saat ini masih tersentralisasi di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek. OJK mengkonfirmasi bahwa sebanyak 94 persen penyelenggara *fintech* berada di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengembangkan sektor *fintech*, Kemenkominfo perlu mendorong pemerataan akses infrastruktur digital, terutama di luar Pulau Jawa. Ketidaktercapaian target

kinerja di tahun 2021 salah satunya dikarenakan kesalahan perhitungan dan pertimbangan Kemenkominfo dalam menentukan lokasi pembangunan BTS. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Kemenkominfo agar meningkatkan ketepatan perhitungan dan pertimbangan dalam menentukan area pembangunan BTS di tahun selanjutnya.

Masih berkaitan dengan pengembangan sektor *fintech*, Indonesia saat ini masih belum memiliki komponen penting untuk mempercepat inklusi keuangan melalui sektor *fintech*, yaitu identitas digital perorangan. Pentingnya ID digital tersebut menjadi perhatian pemerintah yang tertuang dalam Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025, guna membuka akses layanan finansial bagi seluruh pihak terkait. Implementasi ID digital diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri *fintech* semakin maju. Industri *fintech* tentunya akan mendapatkan *benefit* melalui penggunaan ID Digital sebagai alat verifikasi '*Know Your Customer*' (KYC) secara instan. Implementasi ID digital juga akan mendorong terciptanya transparansi, meminimalisir penipuan, serta meminimalisir hak-hak individu. Keberhasilan implementasi sistem identitas digital guna memacu pertumbuhan *fintech* tentunya akan menjadi katalis bagi percepatan transformasi digital sektor keuangan. Di Indonesia sendiri, rencana implementasi KTP digital telah digaungkan oleh pemerintah. Namun, pro kontra masih terjadi di kalangan masyarakat. Pasalnya, KTP digital hanya dapat digunakan oleh masyarakat yang memiliki *smartphone* dan terkoneksi ke jaringan internet. Hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan baru di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya implementasi sistem identitas digital yang terintegrasi dan aman. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa identitas digital nantinya dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagi masyarakat yang memiliki *smartphone* dan internet saja. Misalnya

dengan mengoptimalkan penggunaan KTP Elektronik (KTP-el), sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. *Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi (2019-2021)*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/6/1168/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi.html>.

East Ventures. 2022. *Digital Competitiveness Index*. Diakses dari https://east.vc/reports/east-ventures-digital-competitiveness-index-2022/#report_download.

Financial Inclusion *Insight Report 2020*. Diakses dari <https://finantier.co/resources/financial-inclusion-insights-in-indonesia/>.

Kemenkominfo. 2021. *Laporan Kinerja Kemenkominfo 2021*. Diakses dari http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/70/REV%201%20FA_Lakip%20Kementerian%20Kominform%202021%20Cetak%20low.pdf.

Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Dilema di Balik Subsidi Energi

Damia Liana^{*)}

Abstrak

Pemerintah bersama dengan DPR RI menyepakati penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 sebesar Rp74,9 triliun. Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menjalankan fungsi APBN sebagai shock absorber dalam jangka pendek. Namun, kebijakan subsidi energi ini dinilai tidak dapat dilakukan dalam jangka panjang karena dinilai tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas, sehingga pemerintah perlu solusi selain subsidi energi.

Pemerintah mengajukan penambahan APBN 2022 untuk subsidi energi sebagai respons menghadapi kenaikan harga komoditas energi. Kementerian Keuangan mencatat selama 2017-2021, realisasi subsidi energi cenderung fluktuatif, sedangkan tahun 2022 subsidi energi mengalami kenaikan yang signifikan (Gambar 1). Dalam Nota Keuangan Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp134 triliun dengan asumsi *Indonesia Crude Price* (ICP) USD63 per barel, namun meningkatnya harga komoditas energi menyebabkan asumsi ICP mengalami kenaikan menjadi USD100 per barel. Hal ini menyebabkan beban subsidi yang harus ditanggung oleh APBN 2022 meningkat menjadi Rp208,9 triliun. Selisih alokasi subsidi energi pada APBN 2022 sebesar Rp74,9 triliun tersebut telah disetujui oleh Badan

Anggaran (Banggar) DPR RI pada 19 Mei 2022.

Langkah ini ditempuh pemerintah untuk menopang keuangan Pertamina dan PLN yang telah mengalami pemburukan akibat kenaikan ICP serta untuk menjaga ketersediaan energi nasional (Kementerian Keuangan, 2022). Kenaikan ICP membuat harga keekonomian BBM dan LPG mengalami peningkatan (Gambar 2), sehingga terdapat *gap* yang semakin besar antara harga jual eceran BBM dan LPG dengan harga keekonomiannya.

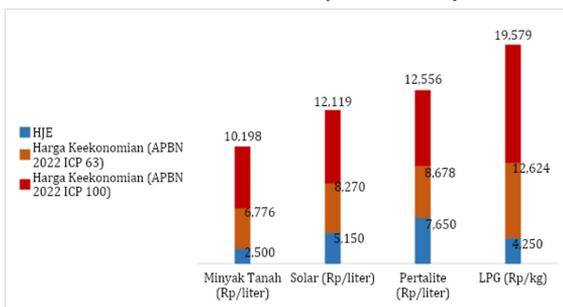
Hal ini sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada 6 Juli 2022, bahwa disparitas harga jual BBM dan LPG 3 kilogram sudah sangat terpaut jauh dari harga keekonomiannya. Harga

Gambar 1. Realisasi dan Alokasi Subsidi Energi 2017-2022 (Triliun Rupiah)



Sumber: DJPB dan APBN Kita Kementerian Keuangan, 2022

Gambar 2. Harga Jual Eceran (HJE) dan Harga Keekonomian BBM (ICP USD100)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2022

^{*)} Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: damialiana63@gmail.com

keekonomian Jenis BBM Tertentu (JBT) solar sudah mencapai angka Rp18.150 per liter, sedangkan harga jual dari pemerintah saat ini untuk solar hanya Rp5.150. Ini menunjukkan bahwa pemerintah harus menanggung subsidi sebesar Rp13.000 untuk setiap pembelian satu liter JBT solar. Sedangkan untuk LPG, harga jual dari pemerintah saat ini Rp4.250 per kilogram, sehingga pemerintah harus mengalokasikan subsidi sebesar Rp11.448 per kilogram. Tidak hanya BBM dan LPG, kenaikan ICP turut meningkatkan subsidi listrik karena pemerintah tidak melakukan penyesuaian tarif listrik. Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasadjo, kenaikan ICP sebesar USD1 akan berdampak pada kenaikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik sebesar Rp500 miliar (PLN, 2022).

Kebijakan subsidi energi mungkin dapat menjadi solusi untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Namun, kebijakan subsidi energi dalam jangka panjang hanya akan menjadi beban yang sangat berat bagi APBN, terutama di tengah tren kenaikan utang negara. Untuk itu tulisan ini akan mengulas terkait dengan kebijakan subsidi energi Indonesia.

Kebijakan Subsidi dalam Jangka Pendek untuk Melindungi Masyarakat

Walaupun harga komoditas energi mengalami kenaikan, pemerintah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi, LPG 3 kg, dan tarif listrik agar daya beli masyarakat tetap terjaga, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah-bawah, rentan miskin, dan UMKM. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran subsidi energi pada APBN 2022, agar peran APBN sebagai *shock absorber* dapat dioptimalkan dalam melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Pemerintah merancang kebijakan penyaluran BBM subsidi dan LPG 3 kg secara tertutup agar lebih tepat sasaran. Per 1 Juli 2022, Pertamina

menerapkan mekanisme baru, yakni dengan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berhak menggunakan BBM solar bersubsidi dan BBM penugasan jenis pertalite. Masyarakat yang hendak membeli BBM subsidi diminta untuk melakukan pendaftaran melalui *website* Pertamina, sehingga nantinya kendaraan yang akan membeli BBM subsidi dapat diverifikasi kelayakannya terlebih dahulu. Pemerintah juga berencana untuk menerapkan penyaluran LPG 3 kg secara tertutup, yaitu dengan menasar langsung kepada individu (tertutup) yaitu golongan rumah tangga miskin, rentan, usaha mikro, petani, dan nelayan kecil sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah (DPR, 2022). Saat ini pemerintah telah melakukan *pilot project* program *trade in* LPG 3 kg ke LPG 5,5 kg dan penyaluran LPG subsidi secara nontunai yang terintegrasi dengan program bansos pada beberapa kota. Namun, diakui oleh pemerintah bahwa distribusi LPG subsidi tertutup ini membutuhkan basis data yang kuat (Kementerian ESDM, 2022).

Tepatkah Kebijakan Subsidi dalam Jangka Panjang?

Kebijakan menambah anggaran subsidi mungkin dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk meredam dampak kenaikan harga komoditas dalam jangka pendek. Namun, mengingat beban yang harus ditanggung oleh APBN semakin berat, terutama di tengah tren peningkatan utang negara, kebijakan subsidi ini tidak akan efektif untuk terus tetap dilanjutkan dalam jangka panjang. Subsidi energi masih dihadapkan pada berbagai persoalan, misalnya penerima subsidi yang tidak tepat sasaran. Penyaluran BBM subsidi selama ini dinilai masih kurang tepat sasaran karena masyarakat masih leluasa menikmati BBM subsidi. Selain itu, sampai saat ini, pemerintah juga masih belum memiliki kontrol yang baik terkait dengan penyaluran LPG 3 kg, hanya masih berupa imbauan kepada masyarakat bahwa LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini terjadi karena penyaluran LPG 3 kg hingga saat ini masih bersifat

terbuka, sehingga membuat setiap golongan masyarakat dan juga restoran-restoran dapat menggunakan LPG 3 kg dapat secara bebas.

Dalam laporan *Indonesia Economic Prospect 2022*, Bank Dunia menjabarkan bahwa subsidi energi tahun 2022 ini lebih banyak menguntungkan rumah tangga menengah-atas. Bank Dunia memperkirakan 42-73 persen subsidi solar dan 29 persen subsidi LPG masih dinikmati oleh kelompok rumah tangga menengah-atas. Pertamina juga mengakui bahwa 60 persen masyarakat mampu mengkonsumsi hampir 80 persen BBM bersubsidi, hanya sekitar 20 persen yang masuk dalam golongan 40 persen masyarakat rentan dan miskin yang menikmati subsidi energi. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam RDP dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga mengatakan bahwa dari 40 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan, hanya 26 persennya saja yang menikmati subsidi listrik.

Menurut Benjamin A. Olken (2022), keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, LPG, dan tarif listrik merupakan beban yang sangat besar bagi anggaran negara, khususnya subsidi energi. Sehingga di masa mendatang, pemerintah harus menemukan solusi untuk membiayainya, seperti meningkatkan pajak di masa depan, mengurangi investasi infrastruktur, atau dengan menurunkan pengeluaran untuk kesehatan dan sosial. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi gejolak peningkatan harga komoditas energi, tidak hanya untuk saat ini saja, namun juga yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

Bank Dunia menyarankan agar pemerintah dapat menghapus subsidi BBM dan menggantinya dengan bantuan sosial (bansos) yang dinilai lebih memiliki target untuk masyarakat miskin, rentan, dan calon kelas menengah. Biaya untuk bansos juga lebih murah, yakni 0,5 persen dari PDB dibandingkan dengan biaya subsidi energi yang bisa mencapai 1,1

persen dari PDB. Sehingga, pemerintah dapat menghemat tambahan fiskal bersih sebesar 0,6 persen dari PDB (Bank Dunia, 2022). Chatib Basri (2022) dalam salah satu tulisannya juga menyatakan bahwa biaya program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya subsidi energi. Chatib Basri mencontohkan, jika pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap 30 juta orang yang masuk ke dalam kategori masyarakat menengah bawah senilai Rp1 juta per bulan selama 12 bulan, dibutuhkan dana sebesar Rp360 triliun. Angka ini masih jauh di bawah anggaran subsidi dan kompensasi yang dianggarkan oleh pemerintah untuk subsidi energi pada APBN 2022 sebesar Rp520 triliun.

Sejalan dengan apa yang disarankan oleh Bank Dunia, Benjamin A. Olken juga mengatakan bahwa bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus fokus kepada kelompok masyarakat paling miskin dan rentan. Lebih lanjut, Olken mengatakan bahwa dibandingkan pemerintah memberikan subsidi energi yang mayoritas masih dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah dibanding masyarakat miskin, pendekatan yang lebih baik adalah membiarkan harga domestik mengikuti pasar global, namun dengan tetap memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran ketika harga bahan bakar melambung tinggi, sehingga rumah tangga yang rentan dan miskin dapat tetap terlindungi.

Pemerintah Dapat Menerapkan Kebijakan Subsidi Tertutup dengan Memperhatikan Beberapa Hal

Sebelum pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk mencabut subsidi energi secara menyeluruh dan menggantinya dengan bantuan sosial, penyaluran subsidi energi tertutup dapat menjadi opsi yang dijalankan oleh pemerintah dalam jangka pendek. Namun, penyaluran subsidi energi tertutup ini harus diiringi dengan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial saat ini, agar penyaluran subsidi

tertutup ini valid dan mencakup seluruh masyarakat yang masuk dalam golongan 40 persen masyarakat rentan dan miskin maupun UMKM. Penguatan basis data juga akan sangat bermanfaat jika pemerintah menerapkan bantuan sosial dan menghapus subsidi energi.

Selain itu, dibutuhkan kesiapan pemerintah, khususnya Pertamina, dalam menerapkan sistem berbasis digital, karena sistem berbasis digital ini tidak sepenuhnya mampu untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Hal ini mengingat tidak seluruh wilayah Indonesia terjangkau internet dan tidak seluruh masyarakat Indonesia melek teknologi. Pertamina dapat mengadopsi kebijakan yang selama ini telah dijalankan pemerintah, yaitu dengan memberikan kartu khusus bagi penerima BBM subsidi selain melalui aplikasi MyPertamina. Tentunya hal ini juga harus melibatkan pihak lain, seperti Kementerian Sosial yang memiliki data DTKS agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Basri, Muhammad Chatib. 2022. *Aspek Fiskal Program Perlindungan Sosial*.

DPR. 2022. *Komisi VI DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)*.

PLN. 2022. *Tetap Lindungi Rakyat Kecil, Penyesuaian Tarif Listrik Berlaku Hanya untuk Pelanggan Mampu 3.500 VA ke Atas*.

Kementerian ESDM. 2022. *LPG 3 Kg Tepat Sasaran: 50% Masyarakat Miskin Telah Terdata*.

Kementerian Keuangan. 2022. *APBNKita*.

Kementerian Keuangan. 2022. *Kebijakan Antisipatif APBN "Untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat, dan Kesehatan APBN"*.

Kementerian Keuangan. 2021. *Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022*.

Olken, Benjamin A. 2022. *Mengatasi*

Guncangan Harga.

Pertamina. 2022. *Pendaftaran BBM Subsidi Lewat Website My Pertamina Khusus untuk Roda Empat*.

World Bank. 2022. *Indonesia Economic Prospect, June 2022: Financial Deeping for Stronger Growth and Sustainable Recovery*. World Bank: Jakarta.

Peluang dan Tantangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia

Ricka Wardianingsih*)
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo**)

Abstrak

Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas andalan perekonomian nasional dan penghasil devisa negara terbesar Indonesia. Namun hingga saat ini, Indonesia masih hanya berfokus pada ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Padahal, ceruk pasar produk turunan CPO masih sangat besar, baik pasar domestik maupun pasar global. Oleh karena itu, hilirisasi produk turunan CPO harus menjadi fokus pemerintah ke depan. Dalam mendorong hilirisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta produktivitas perkebunan sawit merupakan tantangan yang harus mampu diselesaikan pemerintah.

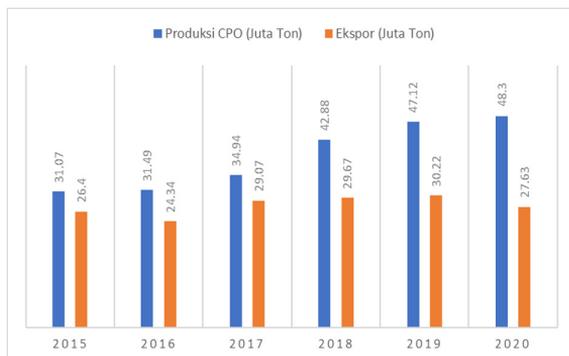
Industri minyak sawit memiliki peran penting dan strategis bagi perekonomian nasional. Selain menjadi penghasil devisa, industri sawit mampu menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini, terdapat 22 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia berhasil mengembangkan perkebunan kelapa sawit, dimana sekitar 90 persen berada di pulau Sumatera dan Kalimantan dengan kontribusi sebesar 95 persen terhadap total produksi minyak sawit mentah/*Crude Palm Oil* (CPO) Indonesia.

Sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi penghasil CPO terbesar di dunia yang memiliki peranan penting dalam memasok dan memenuhi permintaan minyak nabati di tingkat global. Gambar 1 menunjukkan produksi CPO yang terus meningkat setiap tahunnya sepanjang

tahun 2015 hingga 2020. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yang disebabkan oleh peningkatan luas areal perkebunan kelapa sawit.

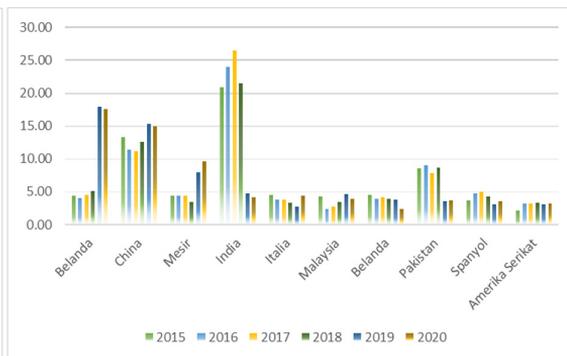
Dari sisi volume, ekspor selama tahun 2015 sampai tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Namun pada 2020, volume ekspor minyak sawit mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dari Gambar 1 terlihat bahwa mayoritas produksi CPO Indonesia diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Pada tahun 2015 hingga 2020, India, China Pakistan, Bangladesh, Mesir, Belanda, Italia, Malaysia, Spanyol dan Amerika Serikat merupakan sepuluh

Gambar 1. Produksi dan Ekspor Minyak Kelapa Sawit



Sumber: BPS, Statistik CPO Indonesia (2020)

Gambar 2. Importir CPO Terbesar dari Indonesia



Sumber: comtrade.un.org (2015-2020)

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: rickawardyas@gmail.com

***) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: adhiprasw@gmail.com

besar negara pengimpor CPO Indonesia (Gambar 2). Total ekspor CPO ke sepuluh negara tersebut mencapai 86,68 persen dari total ekspor CPO Indonesia. Negara tujuan ekspor CPO Indonesia terbesar, yaitu India, dengan volume ekspor 4,39 juta ton atau 61,23 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai USD2,87 miliar. Selanjutnya, negara tujuan ekspor CPO terbesar lainnya adalah Spanyol dan Malaysia, dengan kontribusi ekspor sebesar 10,73 persen dan 5,22 persen.

Peningkatan nilai dan volume ekspor CPO ke pasar dunia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, baik melalui kinerja neraca perdagangan, cadangan devisa, keuangan negara, maupun nilai tukar rupiah. Namun sayangnya, Indonesia masih hanya fokus pada ekspor CPO, belum bergeser pada hilirisasi produk turunan CPO dalam memenuhi kebutuhan domestik dan kebutuhan di pasar global. Padahal, ceruk pasar produk turunan CPO sangat besar, baik di dalam negeri maupun pasar global. Bukan hanya itu saja, hilirisasi produk turunan CPO diyakini akan memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi perekonomian nasional dibanding hanya sekedar mengekspor CPO. Dampaknya akan jauh lebih besar bagi kinerja neraca perdagangan, cadangan devisa, keuangan negara, nilai tukar rupiah, hingga ketenagakerjaan dan kemiskinan. Besarnya ceruk pasar dan dampak positif itu sudah seharusnya menjadi penyemangat pemerintah untuk menjadikan hilirisasi turunan CPO sebagai fokus pembangunan di masa mendatang. Oleh karena itu, hilirisasi sangat penting menjadi fokus utama pemerintah agar terus memacu nilai tambah ekonomi dari bahan baku lokal. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah harus mampu menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat produsen produk turunan minyak sawit di dunia pada tahun 2045 mendatang. Artikel ini akan mengupas tentang peluang dan tantangan hilirisasi kelapa sawit di Indonesia, serta kebijakan apa saja yang

sebaiknya dijalankan oleh pemerintah ke depan.

Peluang Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia

Hilirisasi CPO merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Kondisi perkebunan kelapa sawit hingga produksi CPO saat ini merupakan modal besar yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjalankan hilirisasi turunan CPO guna meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Dari sisi hulu, besarnya produksi perkebunan kelapa sawit merupakan modal utama yang dimiliki Indonesia saat ini. Di sisi hilir, besarnya permintaan dan ceruk pasar berbagai produk turunan CPO menjadi peluang yang dapat dioptimalkan dalam menopang perekonomian nasional dalam dimensi jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, pilihan mendorong hilirisasi turunan CPO merupakan pilihan yang harus diambil dan dijalankan oleh pemerintah. Hilirisasi tidak hanya dioptimalkan guna memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan di dalam negeri, namun juga bermanfaat untuk menghasilkan produk substitusi impor di dalam negeri.

Saat ini, salah satu produk turunan CPO yaitu produk *oleochemical* (oleokimia) yang menjadi produk turunan bernilai tambah dan memiliki ceruk pasar yang relatif besar di pasar global. Produk turunan lainnya adalah cokelat, mentega, lipstik, detergen, serta bahan bakar biodiesel. Eropa dan Afrika merupakan salah satu pasar besar atas produk-produk olahan tersebut. Saat ini, terdapat 168 jenis produk turunan CPO yang telah mampu diproduksi oleh industri di dalam negeri. Produksi turunan CPO tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan kimia, hingga biodiesel. Tren hilirisasi turunan CPO, termasuk minyak sawit, di Indonesia menunjukkan potensi yang terus meningkat bagi pasar domestik. Pada tahun 2020, terdapat produksi CPO sebesar 48,3 juta ton yang digunakan sebagai bahan baku industri turunan CPO di dalam negeri. Dalam

perkembangannya, permintaan CPO sebagai bahan baku industri minyak goreng terus mengalami peningkatan. Hal tersebut salah satunya terlihat dari semakin banyaknya *refinery* atau pabrik minyak goreng yang baru dibangun di beberapa daerah. Perkembangan positif ini tentunya akan membutuhkan pasokan CPO sebagai bahan baku yang lebih besar lagi, mengingat pasar minyak sawit mentah global yang juga masih menggiurkan bagi pelaku usaha CPO. Saat ini, pasar global masih membutuhkan pasokan CPO sebagai bahan baku industri turunannya di beberapa negara, seperti di India. Industri *refinery* di India sudah lama berkembang dan membutuhkan pasokan CPO dari Indonesia. Selain India, China juga merupakan salah satu importir terbesar CPO dari Indonesia guna menopang ketersediaan bahan baku industri turun CPO di negaranya. Masih besarnya kebutuhan atau permintaan CPO dari pasar global untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri turunan merupakan tanda masih besarnya permintaan atas berbagai produk turunan CPO dan peluang besar bagi Indonesia untuk melakukan percepatan hilirisasi produk turunan CPO yang sesuai dengan kebutuhan pasar global. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat hilirisasi produk turunan CPO dengan memastikan keseimbangan pasokan produksi CPO dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan besarnya ekspor CPO ke pasar global.

Tantangan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Indonesia

Saat ini, Indonesia masih terus berupaya mengurangi ekspor minyak sawit mentah, serta meningkatkan produksi produk bahan baku (setengah jadi) dan jadi sebagai komoditas ekspor. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia menegaskan Indonesia mampu menjual produk hilir dari minyak sawit mentah atau CPO seperti produk makanan, kesehatan, kecantikan, dan energi. Namun, proses hilirisasi CPO masih menghadapi

sejumlah tantangan. **Pertama**, kualitas teknologi masih terbatas. Indonesia belum banyak memiliki tenaga ahli di bidang kelapa sawit. Demikian pula dengan teknologinya. Secara umum, teknologi dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit masih menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana. Oleh karena itu, tantangan hilirisasi produk turunan CPO di Indonesia tidak hanya membutuhkan melakukan *upgrading* penggunaan teknologi, namun juga harus mampu mencetak ahli-ahli kelapa sawit. Dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan salah satu kanal yang dapat dimaksimalkan pemerintah guna melahirkan sumber daya manusia yang ahli di bidang pengolahan kelapa sawit dan turunannya. Ke depan, beasiswa dan bantuan riset yang dibiayai oleh LPDP juga harus diarahkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mendukung percepatan hilirisasi produk turunan CPO. Untuk teknologi, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian insentif fiskal guna mempercepat modernisasi teknologi di industri hilir dalam negeri, salah satunya yaitu pemberian keringanan bea masuk bagi industri yang melakukan impor mesin dan teknologi. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong inovasi teknologi berbasis *resin sustainable* (peningkatan kualitas CPO) untuk meningkatkan mutu CPO. Hal ini diperlukan agar kualitas CPO yang dihasilkan mampu sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh industri hilir.

Tantangan selanjutnya yaitu rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit. Saat ini, tingkat produktivitas minyak kelapa sawit relatif masih rendah, karena sebagian besar bersumber dari perkebunan rakyat (Kementerian Perindustrian, 2021). Selain itu, tantangan di sisi hulu juga masih dihadapkan masih cukup luasnya lahan perkebunan sawit yang sudah kurang produktif. Menurut data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dari luas areal petani plasma sekitar 6,72 juta hektar, terdapat 2,8

juta hektar yang perlu diremajakan, yang terdiri dari pohon kelapa sawit yang telah berumur diatas 25 tahun, serta pohon yang berasal dari bibit yang tidak bersertifikat (palsu) di perkebunan rakyat (Kementerian Perindustrian, 2021). Rendahnya produktivitas dan masih cukup luasnya lahan yang kurang produktif akan menjadi hambatan dan tantangan dalam mendorong percepatan hilirisasi produk turunan CPO ke depannya di tengah permintaan CPO global yang masih menggiurkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya mendorong produktivitas dan peremajaan lahan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif agar nantinya mampu memenuhi pasokan kebutuhan CPO bagi industri hilir dalam negeri. Namun upaya tersebut juga harus diikuti dengan upaya menjaga keberlanjutan (*sustainability*) dan keseimbangan lingkungan.

Daftar Pustaka

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2019. *Outlook Teknologi Pangan 2019. Teknologi Industri Pangan Berbasis Minyak Sawit.*

Bambang. 2021. *Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Terhadap Permintaan CPO Pada Industri Hilir.*

Delima. 2018. *Hilirisasi Kelapa Sawit: Kinerja, Kendala dan Prospek.*

Bappenas. 2021. *Industrialisasi Sawit Nasional: Realistas dan Tantangan.*

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. 2020. *Tantangan Besar Perkebunan Sawit Di Indonesia.*

Ilham. 2021. *Pemerintah Fokus Hilirisasi Industri Minyak kelapa Sawit.*

Kementerian Perindustrian RI. 2021. *Analisis Pembangunan Industri. Tantangan dan Prospek Hilirisasi Sawit Nasional.*

Satria. 2022. *Tantangan Pembangunan Industri Sawit Indonesia yang Berkelanjutan.*



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

